



Ekonomi Syariah & Sosial-Keagamaan Jawa Barat

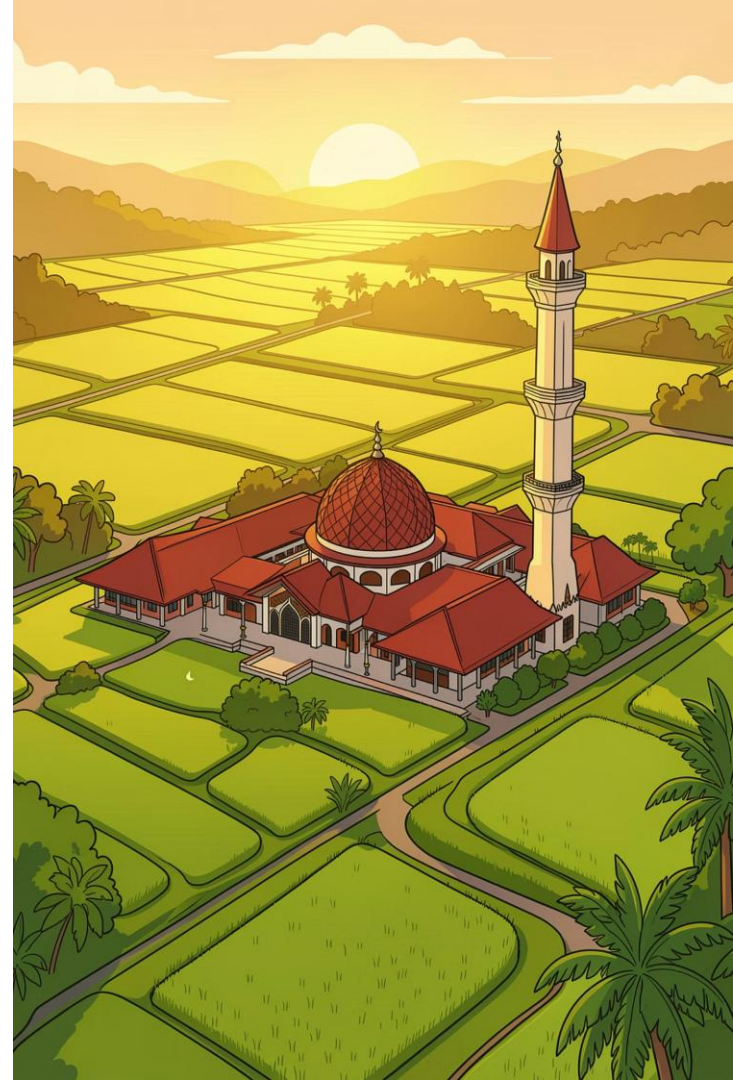
Kontribusi nyata ekonomi syariah dan sosial-keagamaan terhadap ekonomi berkeadilan, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan kelas menengah Muslim di Jawa Barat — sebuah analisis berbasis data dan perspektif maqashid syariah.

EKONOMI SYARIAH

PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA BARAT 2024–2025

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Maqashid Syariah sebagai Paradigma Pembangunan

Dalam ekonomi Islam, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi dari kemampuannya menciptakan **keadilan distributif**, memperluas akses ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Konsep *falah* — kesejahteraan menyeluruh — dan **maqashid syariah** (Al-Shatibi) menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama pembangunan. Pertanyaan kuncinya bukan hanya *apakah ekonomi tumbuh*, tetapi *siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut*.

Hifz al-Din

Perlindungan agama sebagai fondasi nilai dalam seluruh aktivitas ekonomi

Hifz al-Nafs

Perlindungan jiwa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, dan keamanan

Hifz al-Aql

Perlindungan akal melalui pendidikan, literasi, dan pengembangan kapasitas SDM

Hifz al-Nasl

Perlindungan keturunan melalui ketahanan keluarga dan keberlanjutan sosial

Hifz al-Mal

Perlindungan dan pemberdayaan harta melalui pengelolaan produktif, etis, dan berkeadilan

Kinerja Makroekonomi Jawa Barat 2024

BPS Provinsi Jawa Barat mencatat kinerja ekonomi yang cukup baik pada 2024: pertumbuhan 4,95%, penurunan kemiskinan menjadi 7,08%, peningkatan IPM menjadi 74,92, dan penurunan pengangguran menjadi 6,75%. Namun, **Gini Ratio meningkat menjadi 0,428** — sinyal bahwa distribusi manfaat pembangunan masih belum merata.

4,95%

Pertumbuhan Ekonomi

PDB Jawa Barat 2024 (c-to-c)

7,08%

Tingkat Kemiskinan

~3,67 juta jiwa, turun dari 7,46% di Maret 2024

74,92

Indeks Pembangunan Manusia

Mencakup pendidikan, kesehatan, dan daya beli

6,75%

Tingkat Pengangguran

Turun dari 7,44% pada Agustus 2023

0,428

Gini Ratio

Ketimpangan sedang, meningkat dari 0,421 di Maret 2024



Paradoks Pembangunan: Pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan belum disertai pemerataan yang lebih baik. Gini Ratio yang meningkat menunjukkan manfaat pertumbuhan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara proporsional — bertentangan dengan prinsip keadilan distributif (QS. Al-Hasyr: 7).

UMKM Syariah & Industri Halal: Motor Pertumbuhan

Jawa Barat memiliki sekitar **5,4 juta UMKM** (85% usaha mikro) yang bergerak di sektor kuliner halal, fesyen Muslim, perdagangan, dan industri kreatif. Hingga 2025, terdapat **875.975 sertifikat halal** mencakup hampir 2 juta produk — menjadikan Jawa Barat salah satu pusat industri halal terbesar di Indonesia.

UMKM sebagai Fondasi Kelas Menengah

- 5,4 juta unit usaha, didominasi usaha mikro
- Sektor utama: kuliner, fesyen, perdagangan, jasa, kreatif
- Motor mobilitas sosial dan pembentukan kelas menengah produktif
- Basis terkuat untuk pemberdayaan ekonomi umat

Industri Halal sebagai Growth Engine

- 875.975 sertifikat halal, ~2 juta produk tersertifikasi
- Meningkatkan daya saing dan akses pasar domestik-internasional
- Peluang memasuki pasar halal global bernilai triliunan dolar
- Jembatan nilai agama dan pembangunan ekonomi modern

Ekosistem Keuangan Syariah Jawa Barat

Statistik Perbankan Syariah OJK (Desember 2024) menunjukkan jaringan keuangan syariah Jawa Barat yang terus berkembang. Namun, SNLIK 2024 mengungkap kesenjangan besar: literasi keuangan syariah hanya **39,11%** dan inklusi hanya **12,88%** — jauh di bawah rata-rata nasional (65,43% dan 75,02%).



Bank Umum Syariah & UUS

52 kantor BUS dan UUS tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat, menyediakan pembiayaan bagi UMKM dan sektor produktif



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

27 BPRS melayani segmen mikro dan kecil yang belum terjangkau perbankan konvensional



Kantor Cabang Pembantu

227 kantor cabang pembantu syariah memperluas jangkauan layanan keuangan ke berbagai lapisan masyarakat

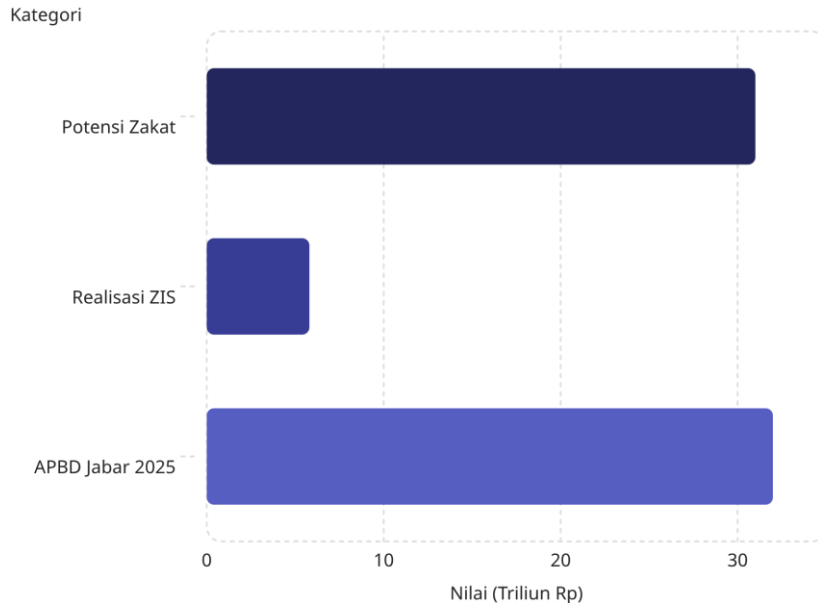


Fintech Syariah

Teknologi digital membuka akses pembiayaan cepat bagi generasi muda dan pelaku usaha mikro berbasis digital

ZISWAF: Kapasitas Fiskal Sosial yang Belum Optimal

Potensi zakat Jawa Barat mencapai **Rp30–32 triliun per tahun** — hampir setara APBD Provinsi 2025 (Rp31,99 triliun). Namun, realisasi penghimpunan baru mencapai **Rp5,8 triliun** atau sekitar 6–8% dari potensi. Ini bukan soal kurangnya sumber daya, melainkan kemampuan kelembagaan mengoptimalkannya.



Program Zakat Produktif BAZNAS Jabar

- **Mustahik Pengusaha:** bantuan modal dan pendampingan UMKM bagi kelompok miskin
- **Mustahik to Pengusaha:** target 1.500 UMKM di 20 kabupaten/kota
- **Dhuafa Investor:** pemberdayaan ekonomi berbasis investasi sosial

Wakaf produktif membangun aset jangka panjang: pendidikan, kesehatan, dan sentra bisnis umat — manfaat lintas generasi.

Enam Hambatan Struktural Ekonomi Syariah Jawa Barat

1. Rendahnya Literasi & Inklusi Syariah

Literasi 39,11% dan inklusi 12,88% — identitas Muslim mayoritas belum bertransformasi menjadi perilaku ekonomi syariah

2. Fragmentasi Kelembagaan

BI, OJK, KNEKS, Kemenag, BAZNAS, BWI belum terkoordinasi secara terpadu — program berjalan sektoral dan parsial

3. Tantangan Implementasi Regulasi

UMKM menghadapi kendala administratif sertifikasi halal, minimnya pendampingan teknis, dan keterbatasan informasi

4. Lemahnya Integrasi Ekosistem Modern

UMKM halal butuh akses logistik, digitalisasi, rantai pasok, dan pasar ekspor — bukan sekadar sertifikat halal

5. Keterbatasan SDM Profesional

Kebutuhan besar terhadap auditor halal, nazhir wakaf, amil profesional, konsultan keuangan syariah, dan pengembang fintech syariah

6. Belum Optimalnya ZISWAF

Realisasi zakat baru 6–8% dari potensi Rp30–32 triliun; wakaf produktif menghadapi tantangan literasi dan tata kelola

Menjaga Kelas Menengah Muslim dari Middle Income Trap

Data BPS menunjukkan kelas menengah Indonesia turun dari **57,33 juta (2019)** menjadi **47,85 juta (2024)** — berkurang 9,48 juta orang. Di Jawa Barat, ancaman ini nyata: kelas menengah Muslim harus dijaga agar tidak menjadi **kelas konsumtif yang rapuh**, melainkan **kelas produktif yang berdaya saing**.

01

Perkuat Kualitas SDM

Tingkatkan keterampilan kerja, literasi digital, dan produktivitas melampaui IPM 74,92

03

Perkuat Literasi Keuangan Syariah

Tabungan, pembiayaan, investasi, asuransi syariah, zakat produktif, dan wakaf uang

05

Bangun Proteksi Sosial & Ketahanan Keluarga

Dana darurat, asuransi syariah, investasi jangka panjang, dan pengelolaan utang sehat

02

Dorong UMKM Naik Kelas

Legalitas, sertifikasi halal, digitalisasi, akses pembiayaan syariah, dan perluasan pasar

04

Hubungkan dengan Ekonomi Digital & Industri Halal

Jadilah produsen dan inovator halal, bukan sekadar konsumen

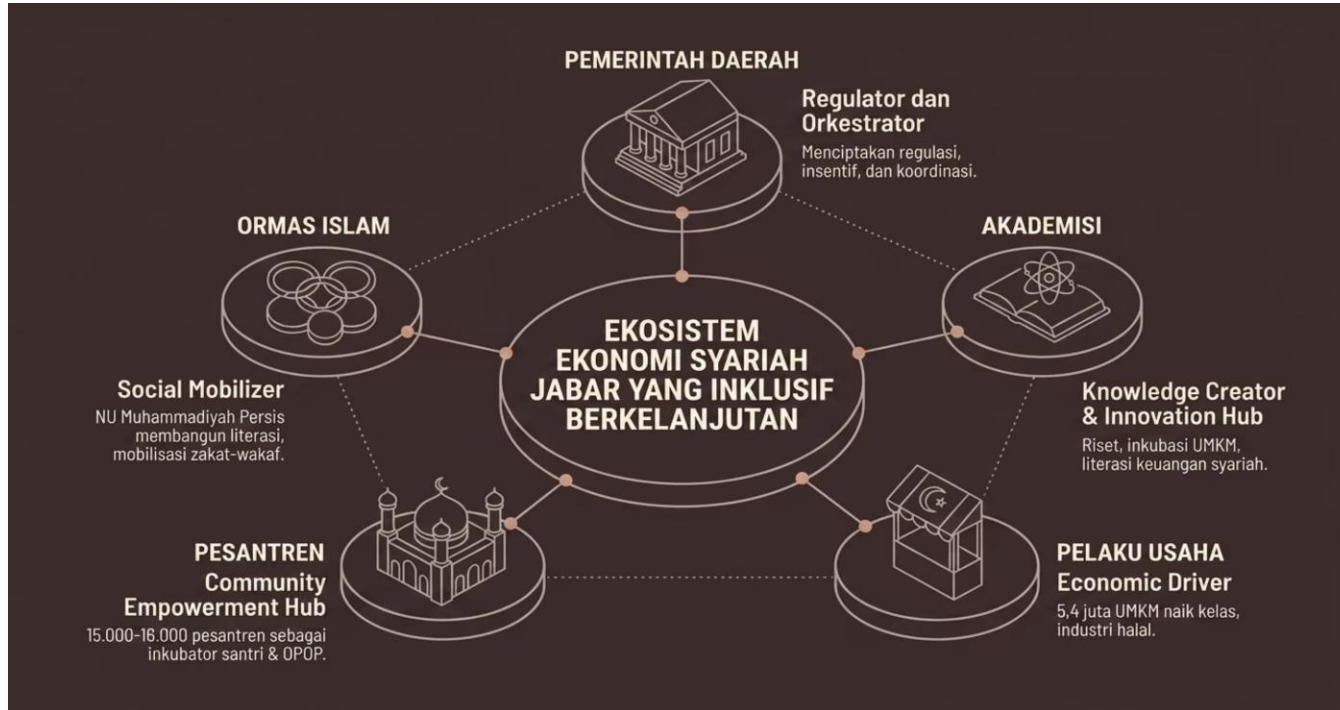
06

Cegah Krisis Identitas

Ekonomi syariah sebagai sistem nilai: produktivitas, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan

Penta Helix Syariah: Arsitektur Kolaborasi Ideal

Berdasarkan *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008), pengembangan ekonomi syariah Jawa Barat memerlukan **Penta Helix Syariah** — kolaborasi terpadu lima aktor utama yang saling melengkapi dalam satu ekosistem.



Model ini didukung oleh **lembaga enabler**: Bank Indonesia, OJK, KNEKS, BAZNAS, BWI, dan BPJPH — memastikan dukungan regulasi, pembiayaan, dan kelembagaan yang memadai bagi seluruh ekosistem.

Sepuluh Rekomendasi Kebijakan Komprehensif

Ekonomi syariah harus diposisikan sebagai **ekosistem pembangunan daerah**, bukan sektor alternatif. Berikut rekomendasi strategis untuk Jawa Barat:

1 Grand Design Ekonomi Syariah Jabar 2026–2030

Peta jalan terintegrasi dengan target, indikator kinerja, dan pembagian peran antarinstansi

2 UMKM Halal Naik Kelas

Sertifikasi halal diikuti peningkatan kualitas, digitalisasi, dan akses pembiayaan syariah

3 Ekosistem Pembiayaan Syariah untuk Sektor Riil

Dana syariah mengalir ke UMKM halal, industri pesantren, dan usaha rakyat melalui blended financin

4 Integrasi ZISWAF dengan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Sistem data terpadu agar zakat dan wakaf produktif tepat sasaran dan berdampak terukur

5 Gerakan Literasi Ekonomi Syariah Masif

Melalui masjid, pesantren, kampus, ormas Islam, dan media digital — dari wacana menjadi perilaku

6 Digitalisasi Ekonomi Syariah

QRIS, marketplace halal, platform zakat-wakaf digital, dan pembiayaan syariah digital

7 Pesantren sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi

Incubator bisnis halal, pelatihan kewirausahaan, dan sentra produksi berbasis komunitas

8 Penguatan SDM & Riset Ekonomi Syariah

Auditor halal, nazhir profesional, amil, konsultan UMKM halal, dan pengembang fintech syariah

9 Penta Helix Syariah dengan Tata Kelola Kolaboratif

Forum koordinasi dengan mandat jelas, data terpadu, dan evaluasi berkala

10 Evaluasi Berbasis Dampak

Ukur keberhasilan dari UMKM naik kelas, mustahik mandiri, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan

